

Jateng Pos
Halaman 1 dan 7
Edisi Kamis, 19 Maret 2015

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (45/bersambung)

Tantiem dan Jaspro Sudah Direncanakan

SEMARANG- PT Bank Jateng selama ini diduga dikelola seperti perusahaan keluarga. Terbukti, rencana pendistribusian cadangan tantiem dan jasa produksi (Jaspro) pun sudah diketahui sebelum digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

Hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli.

LHP No. 446/LHP/BPK/XVIII. SMG/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 tersebut ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng saat itu Dr Criskuntadi.

Berdasarkan memo dari Divisi

**BANK JATENG
BERMASALAH**



SDM ke-pada Direksi tanggal 7 Januari 2014 perihal pembayaran pajak penghasilan atas tantiem (pembagian laba, *red*) dan jasa produksi 2013. Memo tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktur Operasional tanggal 8 Januari 2014. Dalam memo tersebut

telah dikemukakan alternatif pendistribusian cadangan jasa produksi dan tantiem tahun 2013 dan sesuai dengan rapat Direksi 7 Januari 2014.

Atas alternatif pendistribusian cadangan jasa produksi dan tantiem tersebut sebenarnya sudah dapat diketahui perkiraan tantiem dan jasa produksi yang akan didistribusikan.

Alternatif yang disetujui direksi adalah alternatif 1 sebesar Rp 177,900 M. Sehingga akan terdapat kelebihan

cadangan sebesar Rp 38,100 M. Pada saat persetujuan atas memo tersebut, seharusnya cadangan jasa produksi dan tantiem sudah dapat dikoreksi. Sehingga tidak membebani beban operasional tahun 2013.

Dalam memo tersebut juga disebutkan bahwa kelebihan dari pendistribusian cadangan tersebut akan dikembalikan pada pos laba tahun

■ Baca TANTIEM...hal 7

TANTIEM

2013. Namun koreksi tersebut belum dilakukan oleh Divisi Akuntansi. Sehingga laba tahun 2013 disajikan masih lebih kecil.

Hasil pemeriksaan BPK RI lebih lanjut, diketahui bahwa persetujuan RUPS tanggal 29 April 2014 mengalokasikan kelebihan cadangan jasa produksi dan tantiem

sebesar Rp 35 M menjadi cadangan umum.

Atas permasalahan tersebut, BPK berpendapat bahwa pencadangan jasa produksi dan tantiem serta penghargaan akhir masa jabatan direksi memiliki pencadangan yang terlalu tinggi yang berdampak pada kondisi laba yang tidak se-

benarnya.

BPK merekomendasikan Kepala Divisi TSI dan Akuntansi untuk memperhitungkan kelebihan biaya pencadangan tantiem, jasa produksi dan penghargaan akhir masa jabatan Direksi tahun 2013 sebesar Rp 39,4 M dalam biaya tahun 2014. (udi/muz)

dari hal 1

